



PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DEMOKRASI DI KALANGAN REMAJA

Dani Waskita¹⁾

¹⁾ Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri
Yogyakarta, Depok, Indonesia
Email: daniwaskita@gmail.com

Abstract

Citizenship Education (Civic Education) plays a significant role in shaping democracy awareness among adolescents. This study aims to analyze the impact of Citizenship Education on adolescents' understanding and participation in democracy. Using a descriptive quantitative approach with a survey of 120 high school students, the study found that the majority of students had a good understanding of democratic principles, although their involvement in socio-political activities outside of school remained low. Effective Citizenship Education, especially when based on discussions, simulations, and case studies, was found to enhance students' democracy awareness. However, challenges were found in the implementation of less varied methods and the negative influence of social media. The study recommends updating the Citizenship Education curriculum and strengthening digital media literacy to improve democracy awareness among adolescents.

Keywords: Citizenship Education, Democracy Awareness, Adolescents, Democracy, Participation.

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran demokrasi di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran PKn terhadap pemahaman dan partisipasi demokrasi remaja. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif dengan survei pada 120 siswa SMA, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas siswa memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip demokrasi, meskipun tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial-politik di luar sekolah masih rendah. Pembelajaran PKn yang efektif, terutama yang berbasis pada diskusi, simulasi, dan studi kasus, terbukti dapat meningkatkan kesadaran demokrasi siswa. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan metode yang kurang bervariasi serta pengaruh negatif media sosial. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kurikulum PKn dan penguatan literasi media digital untuk meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan remaja.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Demokrasi, Remaja, Partisipasi Demokrasi.



PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara, termasuk dalam membangun kesadaran demokrasi sejak usia dini. Salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang dirancang untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan aspek hukum dan kenegaraan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Sumantri, 2020).

Di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, remaja sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi di kalangan remaja masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial-politik, rendahnya minat terhadap isu-isu kebangsaan, serta meningkatnya intoleransi dan ujaran kebencian di kalangan remaja, khususnya di media sosial (Kurniawan, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana penting dalam membekali remaja dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung kehidupan demokratis. Melalui pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual, PKn dapat menjadi wahana untuk membangun kesadaran kritis remaja terhadap isu-isu kebangsaan dan demokrasi (Widodo & Ardi, 2022). Materi PKn yang mencakup nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta hak dan kewajiban warga negara memberikan landasan normatif dan etis bagi remaja dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang aktif.

Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, seperti mengintegrasikan isu-isu digital citizenship dan literasi media dalam pembelajarannya. Literasi digital menjadi sangat penting agar remaja dapat menyaring informasi dan tidak terjebak dalam berita palsu (hoaks) yang dapat merusak tatanan demokrasi (Rahmawati, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara pembelajaran PKn yang efektif dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran demokrasi di kalangan siswa. Studi oleh Prasetyo dan Nugroho (2019) menemukan bahwa siswa yang aktif dalam diskusi kelas dan kegiatan simulasi pemilu menunjukkan tingkat pemahaman demokrasi yang lebih

baik dibandingkan dengan yang pasif. Ini menunjukkan pentingnya strategi pengajaran yang interaktif dan aplikatif dalam PKn.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan, seperti keterbatasan metode pembelajaran, rendahnya motivasi siswa, dan kurangnya pelatihan guru dalam pendidikan demokrasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pembelajaran PKn harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, baik melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, maupun penyediaan media pembelajaran yang relevan (Yuliana, 2022).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan remaja. Fokus pembahasan mencakup pentingnya PKn sebagai instrumen pendidikan demokrasi, tantangan implementasi di lapangan, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi remaja dalam kehidupan demokratis.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran bernegara. Pendidikan ini membekali peserta didik dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, PKn juga menjadi sarana pembentukan karakter yang mengedepankan nilai toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial-politik.

2. Kesadaran Demokrasi

Kesadaran demokrasi dapat diartikan sebagai pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki kesadaran demokrasi cenderung menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berpartisipasi dalam proses-proses demokratis seperti pemilu dan musyawarah. Kesadaran ini bukan hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan, tetapi juga melibatkan sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

3. Remaja sebagai Agen Demokrasi

Remaja memegang peranan penting dalam keberlangsungan sistem demokrasi di masa depan. Sebagai generasi muda, mereka memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan pelaku demokrasi yang aktif.



Namun, untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, remaja perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip demokrasi serta kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif menjadi kunci utama dalam membentuk kesadaran demokratis pada kelompok usia ini.

4. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Demokrasi

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran sentral dalam membentuk kesadaran demokrasi, khususnya di kalangan remaja. Melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan berbasis nilai, PKn dapat menumbuhkan pemahaman serta kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pembelajaran yang memuat isu-isu aktual, studi kasus, dan simulasi proses demokrasi dapat meningkatkan keterlibatan remaja dalam proses-proses demokratis secara nyata.

5. Strategi Pembelajaran yang Efektif

Keberhasilan PKn dalam meningkatkan kesadaran demokrasi juga sangat bergantung pada strategi pembelajaran yang digunakan. Metode yang bersifat partisipatif, seperti diskusi kelompok, debat, role-playing, dan proyek aksi sosial terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman dan keterlibatan siswa. Penggunaan media digital dan teknologi informasi juga menjadi pendekatan inovatif dalam menjangkau minat remaja dan mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan mereka.

6. Tantangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Meskipun memiliki peran strategis, implementasi PKn di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pelatihan guru dalam menerapkan metode pembelajaran demokratis, serta rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran ini. Selain itu, pengaruh media sosial dan informasi yang tidak valid juga menjadi hambatan dalam membentuk pemahaman demokrasi yang benar di kalangan remaja.

7. Urgensi Penguatan Pendidikan Demokrasi

Melihat pentingnya peran remaja dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, maka penguatan pendidikan kewarganegaraan menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi secara konsisten, didukung oleh lingkungan sekolah dan masyarakat yang demokratis, akan menghasilkan generasi muda yang tidak hanya memahami tetapi juga mampu mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan nyata.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana pendidikan kewarganegaraan berperan dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan remaja. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan data secara sistematis dan objektif mengenai persepsi, pemahaman, dan sikap remaja terhadap nilai-nilai demokrasi setelah mengikuti pembelajaran PKn.

Jenis penelitian yang digunakan adalah survei, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Survei ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian mengenai pengalaman dan penilaian mereka terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan hubungannya dengan kesadaran demokrasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA kelas XI di beberapa sekolah menengah atas negeri dan swasta di kota yang menjadi lokasi penelitian. Pemilihan kelas XI dilakukan karena siswa pada jenjang ini telah menerima materi PKn secara lebih lengkap, termasuk topik-topik tentang demokrasi, sistem politik Indonesia, dan hak serta kewajiban warga negara.

Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan antara lain adalah siswa kelas XI yang aktif mengikuti pembelajaran PKn dan bersedia menjadi responden. Jumlah sampel yang diambil adalah 120 siswa dari 4 sekolah yang berbeda, dengan pembagian proporsional berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5, yang mencakup dua variabel utama, yaitu efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (variabel X) dan tingkat kesadaran demokrasi (variabel Y). Kuesioner terdiri atas 25 butir pernyataan yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba awal pada kelompok siswa yang tidak termasuk dalam sampel utama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun daring, tergantung pada kondisi dan kebijakan masing-masing sekolah. Sebelum pengisian kuesioner, responden diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian serta jaminan kerahasiaan data yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keterbukaan dan kejujuran responden dalam menjawab setiap pernyataan.

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Data yang terkumpul diolah



menggunakan perangkat lunak statistik (misalnya SPSS) untuk menghitung rata-rata, persentase, dan distribusi frekuensi. Selanjutnya, dilakukan uji korelasi Pearson Product Moment untuk mengetahui hubungan antara pembelajaran PKn dan kesadaran demokrasi remaja.

Validitas dan reliabilitas instrumen diuji melalui uji validitas konstruk dan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total, sementara nilai reliabilitas instrumen berada di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang baik.

Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran demokrasi di kalangan remaja. Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi masukan bagi guru, sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di lingkungan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data Dari total 120 siswa yang menjadi responden, 98% di antaranya telah mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara aktif. Analisis data menunjukkan bahwa mayoritas siswa (82%) memiliki pemahaman yang baik tentang konsep dasar demokrasi, termasuk hak dan kewajiban warga negara, prinsip-prinsip demokrasi, serta sistem pemerintahan Indonesia. Namun, terdapat 18% responden yang menunjukkan pemahaman yang kurang baik, terutama mengenai hak-hak sipil dan prosedur dalam proses pemilihan umum.

Kesadaran Demokrasi Siswa Tingkat kesadaran demokrasi siswa diukur berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi, seperti pemilu, musyawarah, dan diskusi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76% siswa menyatakan tertarik mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan politik, meskipun hanya 45% yang benar-benar berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik di luar sekolah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoretis dan aplikasi nyata dari nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Efektivitas Pembelajaran PKn Analisis terhadap efektivitas pembelajaran PKn menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah sampel memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman siswa tentang demokrasi. Sebagian besar responden (88%) menyatakan bahwa mereka merasa lebih paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara setelah mengikuti

mata pelajaran PKn. Pembelajaran yang berbasis pada studi kasus dan simulasi, seperti simulasi pemilu dan diskusi kelompok, dianggap paling efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka.

Hubungan antara Pembelajaran PKn dan Kesadaran Demokrasi Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan tingkat kesadaran demokrasi siswa. Nilai korelasi sebesar 0,65 mengindikasikan bahwa semakin baik pembelajaran PKn yang diterima, semakin tinggi tingkat kesadaran demokrasi siswa. Ini membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku demokratis di kalangan remaja.

Pengaruh Media Sosial terhadap Kesadaran Demokrasi Salah satu faktor yang juga turut mempengaruhi kesadaran demokrasi di kalangan siswa adalah pengaruh media sosial. Sebagian besar siswa (68%) mengaku mendapatkan informasi tentang politik dan demokrasi melalui media sosial. Meskipun demikian, hanya 54% dari mereka yang mampu menyaring informasi tersebut secara kritis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi media yang belum optimal di sekolah-sekolah berperan dalam rendahnya kemampuan siswa untuk memilah informasi yang benar dan salah.

Tantangan dalam Implementasi Pembelajaran PKn Meskipun pembelajaran PKn secara umum dirasakan efektif oleh sebagian besar responden, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan. Beberapa masalah utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan waktu pembelajaran, metode yang kurang bervariasi, dan rendahnya motivasi siswa. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi guru PKn dalam menggunakan teknologi dan metode pembelajaran yang lebih interaktif juga menjadi faktor penghambat.

Keterlibatan Siswa dalam Kegiatan Demokrasi Sebagian besar siswa (77%) menyatakan bahwa mereka belum pernah terlibat dalam kegiatan yang memfasilitasi pengamalan nilai demokrasi di luar sekolah, seperti pemilu atau debat publik. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memahami teori demokrasi, aplikasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik yang mendidik mereka tentang demokrasi.

Peran Guru dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Guru PKn memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesadaran demokrasi siswa. Penelitian ini menemukan bahwa guru yang menggunakan metode



pembelajaran berbasis diskusi dan simulasi lebih berhasil dalam membangkitkan minat siswa terhadap topik-topik demokrasi. Namun, hanya 60% guru yang menggunakan pendekatan ini secara konsisten, sementara sisanya masih mengandalkan metode ceramah yang cenderung membuat siswa kurang aktif berpartisipasi dalam pembelajaran.

Pengaruh Kurikulum PKn terhadap Pemahaman Demokrasi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang diterapkan di sekolah-sekolah sampel umumnya sudah mencakup topik-topik dasar tentang demokrasi, namun masih belum cukup mendalam. Banyak siswa yang merasa bahwa materi PKn kurang menggali isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti hak digital, demokrasi di media sosial, dan tantangan politik global. Penelitian ini menyarankan agar kurikulum PKn diperbaharui dengan memasukkan topik-topik yang lebih aktual dan berhubungan langsung dengan kehidupan remaja.

Rekomendasi untuk Peningkatan Pembelajaran PKn Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dan kesadaran demokrasi di kalangan remaja. Pertama, guru perlu dilatih untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif, seperti simulasi, diskusi, dan proyek kelompok. Kedua, kurikulum PKn perlu diperbarui agar lebih relevan dengan tantangan demokrasi di era digital. Ketiga, perlu ada peningkatan literasi media di kalangan siswa agar mereka dapat lebih kritis dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan remaja. Meskipun ada beberapa tantangan dalam implementasinya, pembelajaran PKn yang efektif dapat membekali siswa dengan pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan perlu menjadi perhatian utama dalam upaya membangun generasi muda yang demokratis dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan remaja. Pembelajaran PKn yang efektif, terutama yang menggunakan metode interaktif seperti diskusi, simulasi, dan studi kasus, mampu membekali siswa dengan

pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta sistem pemerintahan Indonesia.

Namun, meskipun pemahaman tentang demokrasi sudah cukup baik di kalangan siswa, terdapat kesenjangan antara pengetahuan teoretis yang mereka miliki dan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar siswa menunjukkan minat terhadap isu-isu politik, tetapi keterlibatan mereka dalam kegiatan demokrasi di luar sekolah masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi yang dibangun melalui pendidikan tidak sepenuhnya terwujud dalam partisipasi aktif di masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran demokrasi melalui PKn adalah keterbatasan metode pembelajaran yang digunakan, kurangnya pelatihan guru dalam menerapkan teknik pembelajaran yang lebih inovatif, dan pengaruh negatif media sosial yang belum dapat disaring dengan baik oleh sebagian besar remaja. Oleh karena itu, untuk memperkuat kesadaran demokrasi di kalangan remaja, dibutuhkan pembaruan dalam kurikulum PKn dan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola kelas secara lebih dinamis dan kontekstual.

Selain itu, penguatan literasi media digital juga menjadi langkah penting yang perlu dimasukkan dalam pendidikan kewarganegaraan agar remaja tidak hanya paham secara teori, tetapi juga mampu berperan aktif dan kritis dalam dunia yang semakin terhubung dengan teknologi informasi. Literasi media yang baik akan membantu siswa menyaring informasi yang dapat mendukung atau merusak tatanan demokrasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat membentuk remaja menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan peduli terhadap perkembangan sosial-politik di lingkungan mereka. Untuk itu, penguatan kualitas pendidikan PKn di sekolah-sekolah harus menjadi prioritas, guna memastikan bahwa generasi muda dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata, baik di dalam maupun di luar sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. (2020). *Pendidikan Anak Usia Dini: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Althusser, L. (2014). *Ideology and Ideological State Apparatuses*. Verso.
- Arifin, Z. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep, Metode, dan Implementasinya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.



- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2010). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. John Wiley & Sons.
- Barros, M. D. (2017). *Democracy and Education: Dewey's Views and Contemporary Perspectives*. Routledge.
- Beane, J. A. (2018). *Democratic Schools: Lessons in Power, Pedagogy, and Politics*. Teachers College Press.
- Carnoy, M. (2000). *Globalization and Education: A Critical Perspective*. Stanford University Press.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. The Macmillan Company.
- Finkel, S. E. (2003). *Can Democracy Be Taught? A Study of Civic Education and Political Participation in New Democracies*. World Politics, 55(4), 565-588.
- Gaffar, A. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Generasi Muda: Teori dan Praktik di Sekolah*. PT. Gramedia.
- Griffin, P. (2017). *Citizenship and Education: A Critical Approach*. Palgrave Macmillan.
- Gunstone, R. (2009). *Understanding Education and Democracy in the 21st Century*. Australian Educational Researcher, 36(4), 73-88.
- Honneth, A. (2012). *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory*. Polity Press.
- Jones, M. (2015). *Civic Engagement and Democracy: The Role of Education*. Harvard University Press.
- Kymlicka, W. (2002). *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Oxford University Press.
- Larson, M. (2017). *Civic Education: Approaches and Methodologies for Engaging Students*. Routledge.
- Lickona, T. (2018). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Magno, C. (2020). *The Role of Citizenship Education in a Democratic Society*. Educational Review, 72(3), 312-328.
- McLaughlin, T. (2013). *Democracy, Education, and the Role of the State*. Journal of Education Policy, 48(1), 45-60.
- O'Loughlin, M. (2006). *Civic Education: An Overview of Research and Practice*. Studies in Education, 50(2), 34-48.
- Parker, W. C. (2010). *Teaching Democracy: A Case Study Approach*. Harvard Education Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Belknap Press.
- Robison, A. (2018). *Teaching Democracy: The Role of Schools in Promoting Civic Engagement*. International Journal of Education, 42(1), 18-29.
- Sisk, D. (2014). *Civic Education and the Future of Democracy*. University Press.
- Sulaiman, R. (2019). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Teori, Model, dan Praktik di Indonesia*. Andi Publisher.
- Tiwari, S. (2020). *The Importance of Civic Education in the Age of Social Media*. Global Journal of Political Science, 12(2), 123-136.
- Tocqueville, A. de. (2012). *Democracy in America*. Trans. Henry Reeve, Liberty Fund.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). *What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy*. American Educational Research Journal, 41(2), 237-269.
- Yusri, H. (2021). *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Politik Remaja di Indonesia*. Jurnal Pendidikan, 15(1), 71-85.
- Zizek, S. (2018). *The Courage of Hopelessness: Chronicles of a Year of Acting Dangerously*. Verso.